



**RENCANA KERJA
(RENJA)**

TAHUN ANGGARAN 2022



**DISKOMINFO
KALTIM**

**Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur**



KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 ini mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2021 agar kinerja pencapaian target-target pembangunan dapat dimaksimalkan.

Penyusunan Rencana Kerja RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan urusan komunikasi dan informatika.

Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pengelolaan dan penataan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka secara terus menerus perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini untuk mengakomodasi berbagai perubahan/dinamika yang terjadi. Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2022 ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja, serta sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik.

Samarinda, 30 Juli 2021


KEPALA
MUHAMMAD FAISAL, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199402 1 001

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RenjaTahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	20
2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat.....	33
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN.....	40
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	40
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	42
3.3 Program dan Kegiatan.....	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	50
BAB V PENUTUP.....	55
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut sebagai RENJA Diskominfo merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Diskominfo tahun 2019 – 2023 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas dan indikasi kegiatan khusus bidang Informasi Komunikasi Publik, Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian, Aplikasi Informatika, dan Statistik.

Penetapan program, kegiatan dan operasional pelayanan yang ada dirancang secara berjenjang, melalui mekanisme musyawarah pembangunan yang diformulasikan pada setiap tahunnya sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo. Peran pemerintah lebih banyak kepada peran-peran stimulasi, dinamisasi, regulasi dan fasilitasi bagi masyarakat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat terus akan didorong pada setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan saat ini telah berkembang dengan pesat sebagai dampak dari keterbukaan informasi publik sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui media cetak, elektronik, website maupun bertatap muka.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa adalah Program Diskominfo yang merupakan salah satu dari sekian program prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

Untuk mencapai sasaran program seperti tersebut di atas, maka disusunlah Rencana Strategis SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 . Renstra ini diwujudkan setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan, dimana pelaksanaannya, berapa dana yang dibutuhkan oleh SKPD untuk mencapai sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Sejalan dengan itu, berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 263 ayat 2 bahwa rencana strategis perangkat daerah dirumuskan ke dalam rencana kerja



Perangkat Daerah digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD; Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah; maka dalam penyusunan RENJA ini Diskominfo berupaya untuk melaksanakan amanat seperti yang tertulis tersebut.

Visi Diskominfo merupakan upaya penjabaran dari visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

**“TERWUJUDNYA AKSES KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG BERKUALITAS
DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR.”**

Maksud dari visi diatas adalah “Terwujudnya akses komunikasi dan informatika yang berkualitas” memiliki arti teknologi informasi merupakan pilar penting dalam mendukung pembangunan, karena dengan teknologi informasi dapat memberikan efisiensi dalam sistem pembangunan serta masyarakat harus mendapatkan informasi yang akurat dan berkualitas, disamping itu harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

Kemudian visi tersebut dijabarkan kedalam misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Mengedepankan aspek sistem pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informasi Publik.
2. Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkualitas.

1.1.1 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja SKPD disusun berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD.

1.1.2 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD

Perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun, hingga perencanaan pada tataran SKPD adalah Renja SKPD. Penyusunan RPJMD dilakukan secara terintegrasi dengan dokumen – dokumen perencanaan lainnya, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar terdapat koordinasi dan sinkronisasi berbagai program/kegiatan baik di pusat maupun di daerah dan pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.



1.1.3 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah

Penetapan program, kegiatan dan operasional pelayanan yang ada dirancang secara berjenjang, melalui mekanisme musyawarah pembangunan yang diformulasikan pada setiap tahunnya sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo. Peran pemerintah lebih banyak kepada peran-peran stimulasi, dinamisasi, regulasi dan fasilitasi bagi masyarakat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat terus akan didorong pada setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan saat ini telah berkembang dengan pesat sebagai dampak dari keterbukaan informasi publik sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui media cetak, elektronik, website maupun bertatap muka.

1.1.4 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renja K/L

Setiap tahun selama periode perencanaan, program/kegiatan Pemerintah Daerah akan dijabarkan dalam RKPD, dan keberadaan RKPD tersebut akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam kaitan dengan sistem keuangan, maka penjabaran RPJMD dan RKPD untuk setiap tahunnya juga akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.1.5 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renja Kabupaten/kota

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renja kabupaten/Kota dilakukan pada saat Forum Perangkat Daerah dengan melakukan evaluasi yang mencakup :

- 1) Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai :
 - Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan informasi publik.
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo, dapat tercapai untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kominfo Perangkat Daerah dengan Renja Kabupaten/Kota tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Kominfo.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RENJA Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :



- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244).
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843).
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846).
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916).
- g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005, tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra OPD.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
- j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5).
- k. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Daerah Kalimantan Timur tahun 2008 nomor 08).
- l. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025.
- m. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 .
- n. Peraturan Gubernur Nomor: 45 tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- o. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun kedepan serta rencana kerjanya.

Tujuan penyusunan Rancangan Renja PD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 adalah sebagai pedoman PD dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2022 sesuai dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan RENJA Diskominfo Prov. Kaltim adalah sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan.

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen Renja.

b. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian Renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan akhir RKPD, penelaahan usulan program kegiatan masyarakat.

c. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan.

d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat Rencana Kerja, program dan kegiatan, sasaran, indicator kinerja, dan pendanaan untuk tahun 2022.

e. Bab V Penutup

Memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja PD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun ke depan oleh PD.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2023, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki visi: “ ***Terwujudnya akses komunikasi dan informatika yang berkualitas***”. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah:

1. Mengedepankan aspek sistem pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informasi Publik.
2. Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkualitas.

Faktor Penyebab Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program / Kegiatan Perencanaan telah sinkron dengan pelaksanaan Proses pengadaan sesuai dengan tatakala yang telah ditetapkan (tepat waktu), dan Evaluasi pekerjaan yang selalu dilakukan. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra - Perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada . Kebijakan/ Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut dengan mempercepat pelaksanaan fisik dan memperketat pengawasan di lapangan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur pada rencana kerja tahun 2022 terdapat 5 program dan 14 kegiatan dengan pagu indikatif yang bersumber dari APBD.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel T- C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur

Urusan	Kode			Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%) 2020		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2	10			Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika									
2	10			Dinas Komunikasi dan Informatika			21.915.277.000	15.977.054.281	13.768.544.450	86.18			
2	10	07		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		4,252,950,000	4.217.796.862	4.032.709.913	95.61			
2	10	07	01	Pelaksana Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran		4,252,950,000	4.217.796.862	4.032.709.913	95.61			
2	10	08		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		1,196,720,000	2.303.400.937	2.227.517.018	96.71			
2	10	08	01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Saranan dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor		336,790,000	1.573.585.437	1.547.699.300	98.35			

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022

2	10	08	02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	859,930,000	729.815.500	679.817.718	93.15			
2	10	09		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1,773,850,000	861.525.000	799.169.183	92.76			
2	10	09	01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1,557,500,000	555.625.000	503.466.183	90.61			
					Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah							
					Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman							
2	10	09	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	216,350,000	305.900.000	295.703.000	96.67			
					Jumlah Pakaian Dinas							
				Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	131,000,000	149.000.000	106.042.500	71.17			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	50,000,000	10.000.000	1.950.000	19.50			
				Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan	81,000,000	139.000.000	104.092.500	74.89			
				Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase siswa sekolah dan mahasiswa yang memiliki sertifikat	381.200.000	30.056.660	29.857.660	99.34			

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022

				kompetensi bidang TIK								
				Peningkatan Sumber Daya TIK	1. Jumlah pelatihan untuk siswa (SD/SMP/SMA/Sederajat)	381.200.000	30.056.660	29.857.660	99.34			
					2. Jumlah bimbingan teknis Pranata Komputer							
2	10	12		Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	Jumlah Lembaga yang mengembangkan media center informasi publik	2.333.625.000	1.155.795.340	845.689.640	87.76			
				Koordinasi bidang Kominfo Antar Lintas SKPD, Lintas Vertikal di daerah, BUMN dan Swasta Lokal Provinsi, Kab/Kota	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Bidang Kominfo		104.800.000	99.900.000	95.32			
				Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah	Workshop, bimtek, sarana dan prasarana kegiatan jurnalistik dll	150.000.000	67.260.000	56.759.500	84.39			
2	10	12	03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah Kerjasama Publikasi Informasi Pembangunan Daerah Melalui RRI, TVRI, Radio Swasta dan TV Swasta, Lokal dan Nasional serta melalui media cetak untuk penerbitan buletin advertorial	2.183.625.000	983.735.340	857.630.140	87.18			
				Penguatan Manajemen Tata Kelola TIK	Jumlah Kab/Kota dalam pemeringkatan E-Government	285.100.000						
2	10	13		Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik	486.600.000	1.220.517.600	1.104.271.150	90.48			
				Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baliho dll	Jumlah poster, leaflet, buletin, baliho yang menginformasikan	175.000.000	345.760.000	344.546.450	99.65			

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022

					kebijakan pemerintah daerah serta pembangunan dan perawatan baliho							
					Komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi	Jumlah dialog interaktif di radio dan televisi	30.000.000	42.750.000	6.278.000	14.69		
					Pengolahan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah	jumlah laporan hasil inventarisasi data dan hasil survei IKM		628.517.600	585.519.150	93.16		
					Dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah	Jumlah laporan dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah	127.000.000	191.690.000	157.927.550	82.39		
2	10	13	05		Partisipasi pada pameran/expo/pekan kebudayaan daerah dan diluar daerah	Jumlah event keikutsertaan pada pameran / expo/ pekan kebudayaan daerah	153.600.00	11.800.000	10.000.000	84.75		
2	10	14			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Cakupan Masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan informasi	481.862.500	236.975.000	236.581.550	99.83		
2	10	14	06		Pengembangan Sumber Informasi Publik	Jumlah PPID Pembantu di Badan Pemerintah Pemprov. Kaltim dan PPID Kab/kota yang dikoordinasikan dalam jejaring pengelolaan pelayanan dan informasi	481.862.500	236.975.000	236.581.550	99.83		
2	10	15			Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.545.942.500	2.267.565.452	1.804.369.552	79.57		
2	10	15	02		Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi	Kapasitas Bandwidth internet	996.700.00	810.350.000	802.009.600	98.97		
2	10	15	03		interkoneksi jaringan intra pemerintah	Jumlah OPD Terhubung dalam	847.205.000	809.700.000	405.017.500	50.02		

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022

					jaringan							
2	10	15	04	Pengembangan Integrasi Sistem Informasi di Pemprov Kaltim & Kab/Kota Kaltim (Interoperabilitas)	Jumlah Aplikasi/Sistem Informasi yang terintegrasi	250.237500	134.624.600	123.331.600	91.61			
				Pembinaan dan Pengembangan Telecenter	Jumlah Jaringan terpasang di Desa Kab/Kota		143.525.000	139.020.000	96.86			
				Penguatan SPBE	Jumlah perangkat daerah yang mendapat pembinaan/penguatan SPBE		369.365.852	334.990.852	90.69			
2	10	16		Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem pengamanan data elektronik	1.521.050.000	3.203.742.463	2.220.117.784	69.30			
2	10	16	04	Pengembangan dan penyelenggaraan DC dan DRC	Jumlah Hosting Aplikasi DC dan DRC	618.050.000	1.817.725.000	1.431.921.500	78.78			
				Government cloud computing	Jumlah Penggunaan Cloud Computing	41.900.000						
				Pelaksanaan audit TIK	Terstandarisasinya Audit TIK	75.500.000	193.618.500	50.807.500	74.18			
				Penangan Insiden Keamanan Informasi	Jumlah Penggunaan Secure Socket Layer Pada Website dan Aplikasi Resmi OPD	91.100.000	1.057.010.500	500.388.500	96,44			
				Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah	Tersedianya sarana pendukung layanan							
2	10	16	10	Peningkatan penyediaan informasi dan data KPU/USO di kaltim	Terlayannya informasi dan data KPU/USO	219.500.000		211.610.900	96,41			
				Penyediaan dan pengumpulan data informasi mitra telekomunikasi dan penyiaran (radio & televisi)	Tersedianya data dan informasi telekomunikasi dan penyiaran							

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022

			Pengawasan dan pengendalian pengamanan informasi, persandian, pos dan telekomunikasi	Tersedianya data dan informasi yang terenkripsi	150.000.000	216.371.188	41.776.675	90.23			
			Pengelolaan Aplikasi (Sistem Informasi Website) Perangkat Daerah di Prov. Kaltim	Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah yang dikelola	166.700.000	44.145.275	1.431.921.500	94.63			
			Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase Program/kegiatan dari hasil rekomendasi penelitian TIK yang dilaksanakan	212.000.000						
			Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Dokumen RIPTIK Rencana Induk Pengembangan TIK) yang dihasilkan	212.000.000						
			Program penguatan dan evaluasi data dan statistik	jumlah Kajian yang diselesaikan		330.678.967	193.618.500	58.55			
			Pengumpulan data statistik daerah	Tersedianya data pembangunan daerah dan data pertumbuhan ekonomi yang akurat dan kredibel		330.678.967	193.618.500	58.55			

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Oktober	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						29.770.575.464	21.191.011.120	71.18	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						6.945.822.400	5.358.525.861	77.15	
2	16	02	1.01		Pengelolaan dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Desiminasi Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik					6.945.822.400	5.358.525.861	77.15	
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Perubahan Pertama Kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	80 Peserta				59.165.000	30.847.400	52.14	
2	16	2	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media	275 Peserta				174.025.000	17.820.953	10.42	

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022

						Komunikasi Publik													
2	16	02	1.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	8 Media Center									101.790.000	61.134.492	60.06	
2	16	2	1.01	9	Manajemen Komunikasi Krisis	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	2 Laporan									93.750.000	5.730.000	6.11	
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	2 Laporan									106.310.000	102.136.000	96.07	
2	16	2	1.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	2 Laporan									125.500.000	975.000	0.78	
2	16	2	1.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	50 Perangkat Daerah									217.357.000	175.358.700	80.68	
2	16	2	1.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah	3 Laporan									278.500.000	193.432.800	69.46	

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022

				Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	yang di kelola									
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah provinsi	26 Perangkat Daerah					1.789.562.550	1.577.859.750	88.17
2	16	03	1.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data daerah						2.970.044.280	1.434.105.398	48.29
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tingkat Kematangan penerapan SPBE	15 Perangkat Daerah					226.100.000	27.390.000	12.11
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah penerapan spbe perangkat daerah	15 Perangkat Daerah					226.100.000	95.361.726	42.18
2	16	03	1.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data daerah	20 Perangkat Daerah					921.250.280	529.031.964	57.43
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam sistem komunikasi	20 Perangkat Daerah					325.000.000	188.439.795	57.98
2	16	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah laporan kordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	1 Laporan					250.000.000	52.419.660	20.97
2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	22 Perangkat Daerah					180.000.000	113.275.654	62.93
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis	jumlah dokumen arsitektur aplikasi	1 Dokumen					226.100.000	46.233.000	20.45

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022

					Pemerintahan Berbasis Elektronik	perangkat daerah													
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	jumlah layanan administrasi publik perangkat daerah yang terintegrasi	22 Perangkat Daerah									310.000.000	224.666.103	72.47	
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas														
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah											305.494.000	157.287.496	51.49	
2	16	03	1.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)														
2	16	03	1.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur										953.673.080	613.541.149	64.33	
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur di Pemprov. Kaltim										953.673.080	613.541.149	64.33	

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022

2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Buku Data Statistik Sektoral yang terpublikasikan	3 Buku					382.199.500	292.483.477	76.53
2	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas SDM nya dalam rangka peningkatan mutu statistik sektoral yang terintegrasi	6 Orang					50.000.000	45.085.760	90.17
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Kelengkapan Metadata Statistik Sektoral di Perangkat Daerah	2 Laporan					115.300.000	39.986.800	34.68
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Kebijakan tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2 Laporan					118.673.950	60.064.450	50.61
2	20	02	1.01	5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Sistem Informasi Statistik Sektoral yang terintegrasi	1 Sistem Informasi					140.499.630	90.186.042	64.19
2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Otorisasi Statistik Sektoral di Perangkat Daerah	5 Laporan					147.000.000	85.734.650	58.32
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							316.849.592	157.553.456	49.72

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022

2	21	02	1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)						296.849.592	145.409.786	48.98	
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	1 Dokumen					70.000.000	18.059.286	25.80
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	jumlah laporan pengamanan informasi berbasis elektronik dan non elektronik	30 Orang					70.000.000	27.013.500	38.59
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah perangkat daerah yang terlayani keamanan informasi	1 Laporan					29.600.000	13.972.800	47.21
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang terlayani keamanan informasi	22 Perangkat Daerah					127.249.592	86.364.200	67.87
2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Pemanfaatan Jaring Komunikasi Sandi untuk Pengamanan Informasi Publik yang dikecualikan						20.000.000	12.143.670	60.72
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	jumlah laporan operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi antar provinsi dan kab/kota	1 Laporan					20.000.000	12.143.670	60.72
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI									
2	16	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat									

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022

					Daerah												
2	16	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan BMD	1 Laporan										
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
2	16	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	30 Orang										
2	16	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	124 Stel						110.135.000	109.325.000		99.26	
2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10.675.536.354	7.206.258.572		67.50	
2	16	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Laporan Tanggapan hasil pemeriksaan	2 Dokumen										
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Daftar Gaji dan Tunjangan	14 Laporan						10.675.536.354	7.206.258.572		67.50	
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen LS dan GU Yang diverifikasi	200 Dokumen										
2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel	1 Dokumen										
2	16	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Rekonsiliasi Realisasi keuangan yang dilaksanakan	12 Laporan										
2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daaerah												
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2 Laporan										

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022

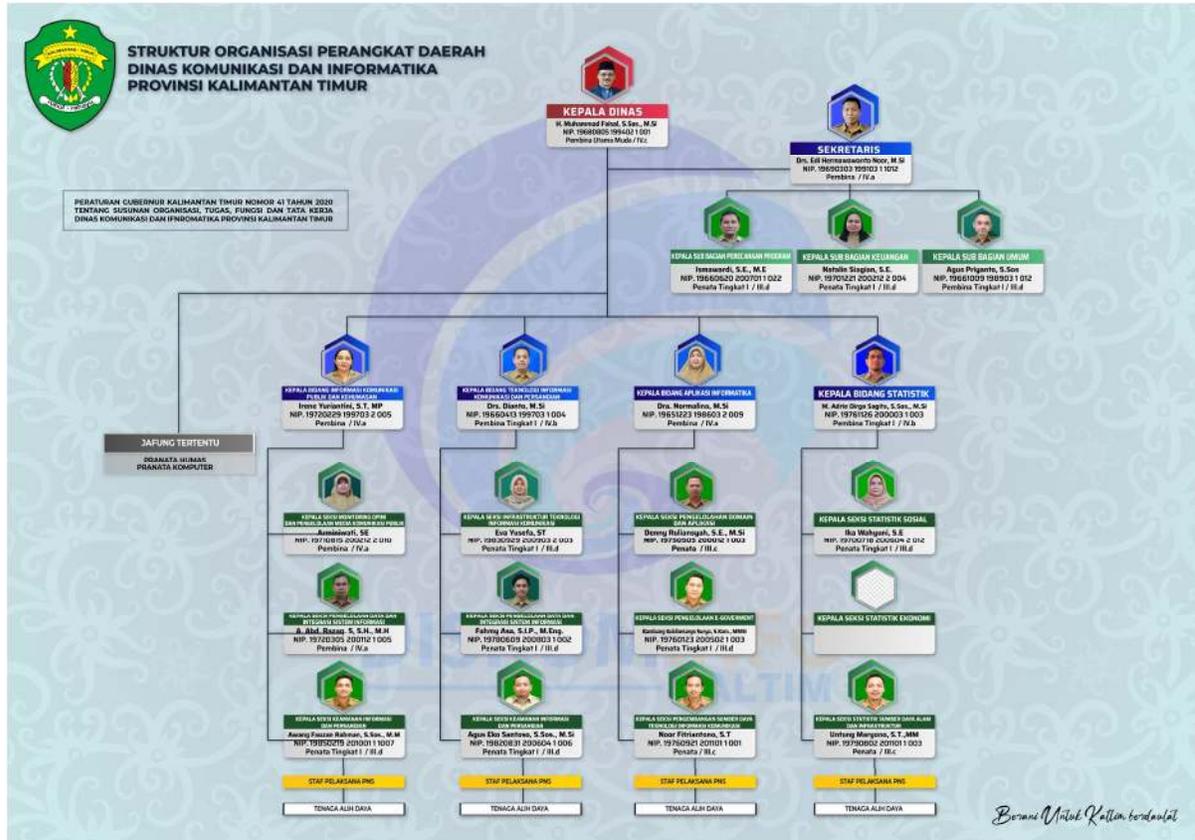
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	1 Laporan										
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah laporan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Laporan										
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan										
2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							702.806.300	521.995.733	74.27			
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Laporan					119.660.000	117.980.000	98.60			
2	16	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laporan Jasa Kebersihan Kantor	12 Laporan					251.100.400	183.915.900	73.24			
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Laporan					332.045.900	220.099.833	66.29			
2	16	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional	2 Unit										
2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Penyediaan Mebel	5 Unit					27.200.000	27.200.000	100			
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	20 Unit										
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen jasa Surat menyurat dan benda pos	12 Bulan					3.512.621.562	2.777.668.746	79.08			
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan					6.000.000	4.039.000	67.32			
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan					422.751.113	273.032.003	64.58			

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022

2	16	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan					59.857.000	36.737.000	61.36
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan daftar gaji dan pengelola keuangan	13 Laporan					3.023.995.449	2.463.860.743	81.48
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen					35.375.000	26.667.000	75.41
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	1 Dokumen					49.290.000	360.000	0.73
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	5 Dokumen					5 Dokumen		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh seorang Sekretaris dan empat Kepala Bidang yang masing-masing membawahi tiga Kepala Seksi/Kasubbag (terlihat pada gambar dibawah ini :



Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memiliki fungsi sebagai

berikut:

- Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan Bidang Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.
- Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan.

- d. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian.
- e. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Aplikasi Informatika.
- f. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Statistik.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian, Aplikasi Informatika dan Statistik.
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas Kominfo sesuai dengan lingkup tugasnya. Dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretaris Dinas mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset., dengan dibantu:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat..
- c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset..

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, dengan dibantu:

1. Seksi Monitoring Opini dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi monitoring opini dan pengelolaan media komunikasi publik.;

2. Seksi Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi pelayanan informasi dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.;
3. Seksi Kemitraan Media Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi kemitraan media komunikasi publik.

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian., dengan dibantu:

1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi infrastruktur teknologi informasi komunikasi;
2. Seksi Pengelolaan Data dan Intergrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian yang meliputi pengelolaan data dan integrasi sistem informasi
3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian yang meliputi keamanan informasi dan persandian.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Aplikasi Informatika., dengan dibantu:

1. Seksi Pengelolaan Domain dan Aplikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pengelolaan domain dan aplikasi.

2. Seksi Pengelolaan *e-Government* mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pengelolaan e-government;
3. Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi.

Kepala Bidang Statistik, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis bidang Statistik, dengan dibantu:

1. Seksi Statistik Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis Statistik Sosial;
2. Seksi Statistik Ekonomi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis Statistik Ekonomi;
3. Seksi Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di dukung oleh 113 orang pegawai terdiri dari 51 orang Pegawai Negeri Sipil dan 62 orang Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Kontrak) yang ditempatkan di semua Bidang-Bidang. Untuk 51 Orang PNS berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut:

Tabel 2.3

Data Aparatur Dinas Kominfo Provinsi Kaltim Tahun 2022

No	Jabatan	Pangkat / Golongan	Pendidikan	JENIS KELAMIN	
				Laki2	Perempuan
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda/ IV-c	S2	1	
2	Sekretaris	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	1	
3	Kepala Bidang	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	2	
		Pembina/ IV-a	S2		2
4	Kepala Sub Bagian	Penata Tk. I/ III-d	S2	1	
		Penata Tk. I/ III-d	S1	1	
		Penata / III-c	S2		
		Penata / III-c	S1		1
5	Kepala Seksi	Pembina Tk. I/ IV-b	S1		
		Pembina/ IV-a	S2	1	
		Penata Tk. I/ III-d	S2	4	1
		Penata Tk. I/ III-d	S1	1	2
		Penata / III-c	S2	1	1
		Penata / III-c	S1		
6	Staf	Pembina Tk. I/ IV-b	S1		
		Penata Tk. I / IV-a	S2		
		Penata Tk. I / III-d	S1	1	

	Penata /III-c	S2	1	
	Penata /III-c	S1	2	
	Penata Muda Tk.I/ III-b	S2	1	
	Penata Muda Tk.I/ III-b	S1	4	1
	Penata Muda Tk.I/ III-b	D3		2
	Penata Muda Tk.I/ III-b	SMA	3	1
	Penata Muda/ III-a	S1		1
	Penata Muda/ III-a	D3	1	
	Penata Muda/ III-a	SLTA	2	1
	Pengatur Tk. I/ II-d	D3		
	Pengatur Tk. I/ II-d	SLTA	3	
	Pengatur/ II-c	D3	1	1
	Pengatur/ II-c	SLTA	1	2
	Pengatur Muda Tk. I/ II-b	SLTA	2	
	Pengatur Muda/ II-a	SMA		
	Pengatur Muda/ II-a	SLTP		
	Pengatur Muda/ II-a	SD		
	Total	51	35	16

Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun Perjanjian Kinerja yang memuat Indikator kinerja yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi, berikut dijabarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Tabel T-C.30

No	Indikator	SPM/Standar nasional	ikk	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2) 2020	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2) 2020	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
1	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan dan infrastruktur SPBE yang terintegrasi		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.8 Indeks				Rp. 334.990.852 / 90.69%				
2	Meningkatnya pemanfaatan TIK bagi tata kelola E-Government (SPBE)		Presentase Perangkat Daerah yang Terhubung dalam simpul TIK	43 Persen				Rp. 1.431.921.500 / 78.78%				
			Persentase Sinkronisasi data didalam pusat Data API	100 Persen								
			Presentase Jaringan Komunikasi Informasi Teknologi di Desa Kab/Kota	30 Persen								
5	Meningkatnya Perangkat Daerah yang memiliki system pengamanan data		Presentase Hosting/Co Location Server Perangkat Daerah pada Data Center	100				Rp. 195.223.609 / 90.23%				
			Presentase keamanan system informasi Perangkat Daerah	75								
	Meningkatnya Perangkat Daerah yang memiliki Sistem Pengamanan Data Elektronik		Persentase Data dan Informasi yang ter-enskripsi	82 Persen				Rp. 500.388.500 / 47.34%				
9	Presentase Data Pembangunan Daerah dan Data Pertumbuhan		Presentase Data Pembangunan Daerah dan Data Pertumbuhan Ekonomi yang akurat dan	80 Persen				Rp. 857.630.140 / 87.18%				

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022

	Ekonomi yang akurat dan kredibel		kredibel									
10	Meningkatnya pemanfaatan TIK bagi tata kelola E-Government / Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)		Presentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPBE	35 Persen				Rp. 123.331.600 / 91.61%				
11	Tersedianya aplikasi dan terlayannya penamaan SubDomain "Kaltimprov.go.id" untuk aplikasi Perangkat Daerah Provinsi Kaltim		Presentase subdomain resmi "Kaltimprov.go.id" untuk aplikasi Perangkat Daerah Provinsi Kaltim	60 Persen				Rp. 41.776.675 / 94.63%				
12	Meningkatnya SDM yang mempunyai keterampilan dan kemampuan TIK		Presentase SDM yang memahami dan menguasai TIK	30 Persen				Rp. 29.857.660 / 99.34%				
13	Meningkatkan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi Daerah sesuai standarisasi		Presentase Lembaga yang mengembangkan Media Center Informasi Publik	45 Persen				Rp. 6.278.000 /				
14	Meningkatnya Tata Laksana Komunikasi dan Informatika yang baik		Presentase Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik	84 Persen				Rp. 585.519.150 / 93.16%				
15	Meningkatnya akses layanan informasi		Presentase Cakupan Masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan informasi	84 Persen				Rp. 236.581.50 / 99.83 %				

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022

No	Indikator	SPM/Sta ndar nasional	ikk	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1) 2021	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1) 2021	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
1	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan dan Infrastruktur SPBE yang terintegrasi		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3.2 Indeks	3.2 Indeks	3.2 Indeks		Rp. 95.361.726 /42.18%	Rp. 103.501.500	Rp. 110.501.500	
2	Melaksanakan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat Kematangan Penerapan SPBE berdasarkan 35 Indikator SPBE		3.03 Indeks SPBE	3.03 Indeks SPBE	3.03 Indeks SPBE		Rp. 27.390.000/ 12.11%	Rp. 288.008.000	Rp. 388.008.000	
5	Melaksanakan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Tingkat Penerapan SPBE berdasarkan Rencana Induk Elektronik		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		Rp. 95.361.726/ 42.18	Rp. 126.537.500	Rp. 106.537.500	
	Melaksanakan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Dokumen Arsitektur SPBE		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		Rp. 46.233.000 / 20.45%	Rp. 329.056.000	Rp. 409.056.000	
9	Terselenggaranya Seminar, Kegiatan, Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		Jumlah Seminar		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan		Rp. 30.847.400 /52.14%	Rp. 346.034.000	Rp. 446.034.000	
10	Terselenggaranya Monitoring Opini dan		Jumlah Laporan Aspirasi Etam		10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan		Rp. 174.025.000	Rp. 171.900.000	Rp. 201.900.000	

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022

	Aspirasi Publik		Jumlah Kegiatan Sosialisasi					/ 10.24%			
11	Terselenggaranya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Jumlah Seminar		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp. 61.134.492 / 60.06%	Rp. 146.970.000	Rp. 156.970.000	
12	Terkelolanya Media Komunikasi Publik		Jumlah Berita Jumlah Kegiatan Kreatif Media Jumlah Isu Publik		1000 Berita 1 Kegiatan 10 Laporan	1000 Berita 1 Kegiatan 10 Laporan	1000 Berita 1 Kegiatan 10 Laporan	Rp. 102.136.000 / 96.07%	Rp. 241.972.000	Rp. 241.972.000	
13	Meningkatkan Layanan Hubungan Media		Jumlah Kegiatan Pemantauan Isu Publik dan Seminar Anti Hoax		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Rp. 193.432.800 / 69.46%	Rp.146.640. 000	Rp.146.640. 000	
14	Tersedianya jumlah data pembangunan daerah yang akurat dan kredibel berdasarkan data statistic sosial		Data Statistik Sosial		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 292.483.447 / 76.53%	Rp. 115.200.000	Rp. 115.200.000	
15	Tersedianya jumlah data pembangunan daerah statistic ekonomi		Data Statistik Ekonomi		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 90.186.042 / 64.19%	Rp. 244.727.00	Rp. 244.727.00	
16	Tersedianya jumlah data pembangunan daerah yang akurat dan kredibel berdasarkan data statistik SDA dan infrastruktur		Data Statistik SDA dan infrastruktur		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 45.085.760 / 90.17%	Rp. 222.293.000	Rp. 222.293.000	
17	Meningkatkan Jumlah hosting, co. location, cloud computing pada data center		Jumlah hosting aplikasi/website yang ditempatkan di data center		5 Aplikasi	5 Aplikasi	5 Aplikasi	Rp.529.031. 964 /57.43%	Rp. 2.502.904.00 0	Rp. 2.502.904.00 0	
18	Terhubungnya perangkat daerah dan distribusi Bandwidth dalam simpul jaringan TIK		Jumlah OPD yang terhubung dalam jaringan intra Pemerintah		18 PD	18 PD	18 PD	Rp. 18.059.286 / 25.80%	Rp. 84.743.000	Rp. 84.743.000	
19	Pengelolaan data dan informasi elektronik yang terkoordinir dan tersinkronisasi		Presentase perangkat Daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data		30% PD	30% PD	30% PD	Rp. 12.143.670 / 60.72%	Rp. 55.892.500	Rp. 55.892.500	
20	Sistem penghubung		Presentase layanan public dan		30% Layanan	30%	30%	Rp.	Rp.	Rp.	

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022

	layanan yang terselenggara dengan baik		layanan administrasi yang terintegrasi dengan system penghubung layanan Pemerintah			Layanan	Layanan		86.364.200 /67.87%	167.620.000	107.620.000	
21	Meningkatkan layanan monitoring trafik data keamanan informasi		Jumlah OPD yang di monitor keamanan dan aktivitasnya pada NOC Diskominfo Prov. Kaltim		5 OPD	5 OPD	5 OPD		Rp. 13.972.800 / 47.21%	Rp. 2.655.305.900	Rp. 3.655.305.900	
22	Meningkatkan keamanan informasi pada data center kominfo Prov. Kaltim		Jumlah laporan keamanan informasi pada data center kominfo		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		Rp. 27.013500 / 38.59%	Rp. 373.086.000	Rp. 373.086.000	
23	Meningkatkan Pelayanan komunikasi intra pemerintah yang secure		Jumlah laporan terkait pelaksanaan kegiatan Data Center		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		Rp. 157.287.496 / 51.49%	Rp. 346.034.000	Rp. 346.034.000	
24	Meningkatkan Penanganan insiden keamanan informasi		Jumlah laporan kab/kota yang di audit terkait keamanan informasinya		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		Rp. 13.972.800 / 47.21%	Rp. 171.900.000	Rp. 171.900.000	



Adapun pencapaian urusan bidang Kominfo tahun 2021 dalam upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi secara cepat, tepat, akurat dan terpercaya sesuai kebutuhan masyarakat, maka dalam Tahun 2021 dilaksanakan kegiatan:

1. Penyediaan jaringan layanan informasi yaitu
 - Sewa bandwidth teresterial
 - Sewa Link Fiber Optic
2. Media Center merupakan tempat untuk mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Sosial;
3. Pada tahun 2021 untuk publikasi dilaksanakan pembuatan leaflet, baliho, dan spanduk.
4. Dalam rangka mempublikasikan informasi tentang pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2021 Diskominfo Provinsi Kaltim secara berkesinambungan melakukan kerjasama dengan TVRI Kalimantan Timur dan RRI Samarinda. Acara dialog interaktif di TVRI dilakukan setiap hari Rabu sedangkan untuk RRI setiap hari Selasa dengan nara sumber dari OPD dilingkungan Pemprov. Kaltim, Akademisi, LSM, DPRD dan Tokoh Masyarakat.
5. Pada tahun 2021 setiap Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara rutin dilakukan pendokumentasian.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim direncanakan berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan pameran yang digunakan sebagai sarana publikasi baik kegiatan Dinas Kominfo Prov. Kaltim sendiri maupun capaian pembangunan secara keseluruhan. Di tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim yaitu 2 kegiatan pameran di dalam daerah).

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Adapun isu strategis pada Dinas Kominfo Prov. Kaltim sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi (e-Government) dalam urusan Pemerintahan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- b. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Kalimantan Timur akan informasi pembangunan daerah
- c. Blankspot yang masih terjadi di beberapa daerah pada provinsi Kalimantan Timur dikarenakan minimnya infrastruktur telekomunikasi

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengurus urusan wajib bukan pelayanan dasar. Tugas Pokok yang dibebankan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kaltim tahun 2019-2023 yang akan ditetapkan.

Infrastruktur dasar merupakan fasilitas dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan hal ini infrastruktur rdasar merupakan kebutuhan dasar untuk masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan aktivitas kehidupan dengan baik dan layak. Melihat pentingnya insfrastruktur dasar maka hal ini sangat mempengaruhi kehidupan, salah satunya dapat terkait dengan ekonomi masyarakat. Pembangunan



infrastruktur dasar sering dikaitkan dengan faktor utama(penggerak) pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur seperti telekomunikasi merupakan aspek-aspek penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik, maka penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan dengan keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, dengan meningkatkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang menunjang kegiatan pemerintah daerah dapat diukur dengan jumlah interoperabilitas sistem informasi.

Program-program pembangunan ini harus dilaksanakan secara konsisten agar mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam menetapkan program-program ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur membuat skala prioritas atau bertahap dengan memperhatikan urusan wajib dan urusan pilihan serta mempertimbangkan kondisi faktual isu-isu strategis di daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar dapat memberikan akses layanan informasi dan komunikasi untuk kebutuhan publik secara tepat, cepat, efisien dan efektif serta sinergis dengan perkembangan teknologi yang tersedia.

Di tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur mempunyai sasaran dalam mempercepat dan meningkatkan pelayanan publik, hal utama yang akan dilaksanakan sesuai dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur diantaranya pengembangan infrastruktur TIK dan interoperabilitas aplikasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah provinsi dalam hal pelayanan publik. Disamping itu tidak kalah pentingnya adalah pengembangan akses telekomunikasi di daerah perbatasan, pedalaman, dan daerah tertinggal.

Untuk melaksanakan misi *Good Governance*, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat perlu diakomodir dengan mempermudah akses terhadap informasi publik dengan membuat dan mengembangkan akses sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, bahwa setiap Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah.

Selain itu terdapat beberapa masalah yang terjadi di masyarakat yaitu:

- a. Penduduk yang tinggal di daerah terpencil umumnya berlatar belakang pendidikan kurang memadai;
- b. Pola pikir sederhana, umumnya sibuk bertani;
- c. Kurang kesempatan memperoleh pendidikan karena tidak tersedianya lembaga pendidikan yang memadai di desanya;
- d. Kurangnya Informasi sebagai akibat terjangkaunya desa mereka oleh jaringan layanan informasi.



Tabel **Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur** Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai mana tertera dalam tabel berikut ini:



Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur

Tabel T-C.31

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				51.657.147.693	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				47.707.147.693	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
2	16	02	1.01		Pengelolaan dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi					Pengelolaan dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi					
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan	Kabupaten/Kota	Jumlah Desiminasi Informasi Program Prioritas	80 Peserta	98.580.000	Perumusan Kebijakan Teknis	Kabupaten/Kota	Jumlah Desiminasi	80 Peserta	98.580.000	



					Komunikasi Publik		Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik			Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik			
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten/Kota	Jumlah Perubahan Pertama Kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	275 Peserta	10.422.000	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten/Kota	Jumlah Perubahan Pertama Kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	275 Peserta	10.422.000	
2	16	02	1.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	8 Media Center	113.820.000	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	8 Media Center	113.820.000	
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Kabupaten/Kota	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	2 Laporan	250.000.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Kabupaten/Kota	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	2 Laporan	250.000.000	
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	2 Laporan	15.401.315.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi	2 Laporan	2.301.220.000	



											Publik				
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten/Kota	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	2 Laporan	4.100.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten/Kota	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	2 Laporan	4.100.000.000	
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	50 Perangkat Daerah	469.298.000	Layanan Hubungan Media	Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	50 Perangkat Daerah	469.298.000	
2	16	02	1.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	3 Laporan	350.000.000	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	3 Laporan	350.000.000	
2	16	02	1.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	2 Laporan	6.660.000	Manajemen Komunikasi Krisis	Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	2 Laporan	6.660.000	
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunitas Publik	Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	2 Laporan	150.000.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunitas Publik	Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	2 Laporan	150.000.000	



2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	40 Orang	1.500.000.000	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	40 Orang	1.500.000.000	
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Komunikasi Publik	80 Sengketa	200.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Komunikasi Publik	80 Sengketa	200.000.000	
2	16	02	1.01	13	Penyediaan/Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Sengketa Informasi yang tertangani			Penyediaan/Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Sengketa Informasi yang tertangani			
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					
2	16	03	1.01	1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi					Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi					
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota		34 Perangkat Daerah	425.000.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota		34 Perangkat Daerah	425.000.000	
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra	Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah yang di	26 Perangkat Daerah	4.080.149.030	Penyelenggaraan Sistem Jaringan	Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Domain	26 Perangkat Daerah	4.080.149.030	



					Pemerintah Daerah		kelola			Intra Pemerintah Daerah		Perangkat Daerah yang di kelola			
2	16	03	1.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah provinsi			Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah provinsi			
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	kosong	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data daerah	15 Perangkat Daerah	452.790.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	kosong	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data daerah	15 Perangkat Daerah	452.790.000	
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten/Kota	Tingkat Kematangan penerapan SPBE	15 Perangkat Daerah	147.210.200	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten/Kota	Tingkat Kematangan penerapan SPBE	15 Perangkat Daerah	147.210.200	
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kabupaten/Kota	jumlah penerapan spbe perangkat daerah	20 Perangkat Daerah	2.277.015.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kabupaten/Kota	jumlah penerapan spbe perangkat daerah	20 Perangkat Daerah	2.277.015.000	
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data daerah	20 Perangkat Daerah	118.020.157	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data daerah	20 Perangkat Daerah	118.020.157	
2	16	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam sistem komunikasi	1 Laporan	60.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam sistem komunikasi	1 Laporan	60.000.000	
2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	22 Perangkat Daerah	323.430.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	22 Perangkat Daerah	323.430.000	



2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten/Kota	jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	1 Dokumen	199.999.800	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten/Kota	jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	1 Dokumen	199.999.800	
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kabupaten/Kota	jumlah dokumen arsitektur aplikasi perangkat daerah	22 Perangkat Daerah	128.753.750	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kabupaten/Kota	jumlah dokumen arsitektur aplikasi perangkat daerah	22 Perangkat Daerah	128.753.750	
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas		jumlah layanan administrasi publik perangkat daerah yang terintegrasi			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas		jumlah layanan administrasi publik perangkat daerah yang terintegrasi			
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota			425.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota			425.000.000	
2	16	03	1.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)					Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)					
2	16	03	1.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					



2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur			
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten Kota	Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur di Pemprov. Kaltim	3 Buku		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten / Kota	Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur di Pemprov. Kaltim	3 Buku		
2	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten Kota	Jumlah Buku Data Statistik Sektoral yang terpublikasikan	6 Orang		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Data Statistik Sektoral yang terpublikasikan	6 Orang		
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten Kota	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas SDM nya dalam rangka peningkatan mutu statistik sektoral yang terintegrasi	2 Laporan		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten / Kota	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas SDM nya dalam rangka peningkatan mutu statistik sektoral yang terintegrasi	2 Laporan		
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kabupaten Kota	Jumlah Kelengkapan Metadata Statistik Sektoral di Perangkat Daerah	2 Laporan		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kabupaten / Kota	Jumlah Kelengkapan Metadata Statistik Sektoral di Perangkat Daerah	2 Laporan		
2	20	02	1.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten Kota	Jumlah Kebijakan tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 Sistem Informasi		Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten / Kota	Jumlah Kebijakan tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 Sistem Informasi		
2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kabupaten Kota	Jumlah Sistem Informasi Statistik Sektoral yang terintegrasi	5 Laporan		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kabupaten / Kota	Jumlah Sistem Informasi Statistik Sektoral yang terintegrasi	5 Laporan		



2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Jumlah Otorisasi Statistik Sektoral di Perangkat Daerah			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Jumlah Otorisasi Statistik Sektoral di Perangkat Daerah			
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi					Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi					
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten Kota	/	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	1 Dokumen		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten / Kota	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	1 Dokumen	
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten Kota	/	Jumlah dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	30 Orang		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	30 Orang	
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Kota	/	jumlah laporan pengamanan informasi berbasis elektronik dan non elektronik	1 Laporan		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten / Kota	jumlah laporan pengamanan informasi berbasis elektronik dan non elektronik	1 Laporan	



2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten Kota	/	Jumlah perangkat daerah yang terlayani keamanan informasi	22 Perangkat Daerah		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten / Kota	Jumlah perangkat daerah yang terlayani keamanan informasi	22 Perangkat Daerah		
2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi			Jumlah perangkat daerah yang terlayani keamanan informasi			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi		Jumlah perangkat daerah yang terlayani keamanan informasi			
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kosong		Meningkatnya Pemanfaatan Jaring Komunikasi Sandi untuk Pengamanan Informasi Publik yang dikecualikan	1 Laporan		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kosong	Meningkatnya Pemanfaatan Jaring Komunikasi Sandi untuk Pengamanan Informasi Publik yang dikecualikan	1 Laporan		
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI			jumlah laporan operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi antar provinsi dan kab/kota			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		jumlah laporan operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi antar provinsi dan kab/kota			
2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	/		1 Laporan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten / Kota		1 Laporan		
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Kota	/	Jumlah Laporan Penyusunan BMD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Penyusunan BMD			
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	/		30 Orang		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten / Kota		30 Orang		
2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	124 Stel		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	124 Stel		



2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas		10.967.652.432	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas		11.466.04.009		
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda		2 Dokumen	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda		2 Dokumen	0		
2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Laporan Tanggapan hasil pemeriksaan	14 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Laporan Tanggapan hasil pemeriksaan	14 Laporan			
2	16	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Daftar Gaji dan Tunjangan	200 Dokumen		0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Daftar Gaji dan Tunjangan	200 Dokumen	0	
2	16	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen LS dan GU Yang diverifikasi	1 Dokumen	33.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen LS dan GU Yang diverifikasi	1 Dokumen	33.600.000		
2	16	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel Daerah	12 Laporan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel	12 Laporan			
2	16	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten/Kota	Jumlah Rekonsiliasi Realisasi keuangan yang dilaksanakan			0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten/Kota	Jumlah Rekonsiliasi Realisasi keuangan yang dilaksanakan		0	
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2 Laporan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2 Laporan			
2	16	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Laporan	378.810.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Laporan	378.810.000		
2	16	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	1 Laporan	63.500.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	1 Laporan	63.500.000		



2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daaerah		Jumlah laporan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan		Administrasi Umum Perangkat Daaerah		Jumlah laporan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan		
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD		9.078.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD		19.700.544	
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda		1 Laporan	59.238.050	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda		1 Laporan	59.238.050	
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Samarinda	Jumlah laporan Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Laporan	49.969.800	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Samarinda	Jumlah laporan Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Laporan	49.969.800	
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kota	Jumlah laporan Jasa Kebersihan Kantor	12 Laporan	945.511.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten / Kota	Jumlah laporan Jasa Kebersihan Kantor	12 Laporan	945.511.000	
2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan Pemeliharaan Gedung Kantor	2 Unit		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah laporan Pemeliharaan Gedung Kantor	2 Unit		
2	16	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional	5 Unit	1.163.670.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional	5 Unit	1.163.670.000	
2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Penyediaan Mebel	20 Unit	62.854.000	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Penyediaan Mebel	20 Unit	17.500.000	
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	12 Bulan	946.243.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	12 Bulan	51.800.000	
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen jasa Surat menyurat dan benda pos	12 Bulan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen jasa Surat menyurat dan benda pos	12 Bulan		
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000	
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	482.216.768	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	482.216.768	



2	16	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Laporan	47.880.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Laporan	47.880.000	
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah laporan daftar gaji dan pengelola keuangan	5 Dokumen	3.247.236.832	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah laporan daftar gaji dan pengelola keuangan	5 Dokumen	3.247.236.832	
2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen		
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	5 Dokumen	337.304.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	5 Dokumen	337.304.700	
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah		20.000.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah		20.000.000.000	
2	16	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		249.820.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		249.820.400	



2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Untuk melaksanakan misi *Good Governance*, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat perlu diakomodir dengan mempermudah akses terhadap informasi publik dengan membuat dan mengembangkan akses sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudahan dan wajar. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, bahwa setiap Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah.

Selain itu terdapat beberapa masalah yang terjadi di masyarakat yaitu:

- e. Penduduk yang tinggal di daerah terpencil umumnya berlatar belakang pendidikan kurang memadai;
- f. Pola pikir sederhana, umumnya sibuk bertani;
- g. Kurang kesempatan memperoleh pendidikan karena tidak tersedianya lembaga pendidikan yang memadai di desanya;
- h. Kurangnya Informasi sebagai akibat terjangkaunya desa mereka oleh jaringan layanan informasi.

Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat wilayah Kalimantan Timur adalah kurangnya informasi akibat kurang terjangkaunya daerah-daerah tersebut dengan fasilitas informasi yang ada. Wilayah Kalimantan Timur yang sebagian besar merupakan pengunungan yang tertutup oleh hutan lebat. Kondisi ini tentunya menimbulkan masalah dalam penyelenggara telekomunikasi dan telematika bila sarana yang digunakan menggunakan frekuensi radio. Sinyal frekuensi radio tidak bisa menembus bukit atau hutan yang lebat. Dampak dari hal ini adalah banyaknya daerah yang tidak bisa menerima sinyal (*blank spot*).

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi "corong" terdepan dalam memberikan kualitas informasi yang cepat, tepat, dan akurat mengharuskan bekerja sama dengan instansi terkait seperti TVRI, RRI, dan lembaga penyiaran lainnya. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas diharapkan bukan lagi dalam artian terbatas pada lingkup Pemerintah Provinsi akan tetapi menjangkau seluruh elemen pembangunan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Diharapkan informasi mengenai stabilitas sosial, politik, dan kemandirian;



peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah; serta kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan dapat disebarkan kepada masyarakat secara luas sehingga kebutuhan dan tindak lanjut dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk tahun 2022. Adapun rencana program yang dimaksud sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2022 diantaranya adalah sebagai berikut:



Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
	Pengelolaan dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Desiminasi Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik		
	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota	Jumlah Perubahan Pertama Kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	80 Peserta	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten/Kota	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	275 Peserta	
	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	8 Media Center	



	Manajemen Komunikasi Krisis	Kabupaten/Kota	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	2 Laporan	
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Kabupaten/Kota	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	2 Laporan	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	2 Laporan	
	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	50 Perangkat Daerah	
	Layanan Hubungan Media	Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	3 Laporan	
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	2 Laporan	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	2 Laporan	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunitas Publik	Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Komunikasi Publik	40 Orang	
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa Informasi yang tertangani	80 Sengketa	
	Penyediaan/Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi				
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi				
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah yang di kelola	34 Perangkat Daerah	



	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota	jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah provinsi	26 Perangkat Daerah	
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data daerah		
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	kosong	Tingkat Kematangan penerapan SPBE	15 Perangkat Daerah	
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten/Kota	jumlah penerapan spbe perangkat daerah	15 Perangkat Daerah	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data daerah	20 Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam sistem komunikasi	20 Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	1 Laporan	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kabupaten/Kota	jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	22 Perangkat Daerah	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten/Kota	jumlah dokumen arsitektur aplikasi perangkat daerah	1 Dokumen	
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kabupaten/Kota	jumlah layanan administrasi publik perangkat daerah yang terintegrasi	22 Perangkat Daerah	
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas				
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota			
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)				
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				



	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur		
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur di Pemprov. Kaltim		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Data Statistik Sektoral yang terpublikasikan	3 Buku	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten / Kota	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas SDM nya dalam rangka peningkatan mutu statistik sektoral yang terintegrasi	6 Orang	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten / Kota	Jumlah Kelengkapan Metadata Statistik Sektoral di Perangkat Daerah	2 Laporan	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kabupaten / Kota	Jumlah Kebijakan tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2 Laporan	
	Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten / Kota	Jumlah Sistem Informasi Statistik Sektoral yang terintegrasi	1 Sistem Informasi	
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kabupaten / Kota	Jumlah Otorisasi Statistik Sektoral di Perangkat Daerah	5 Laporan	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)		
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	1 Dokumen	



Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten / Kota	jumlah laporan pengamanan informasi berbasis elektronik dan non elektronik	30 Orang	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten / Kota	Jumlah perangkat daerah yang terlayani keamanan informasi	1 Laporan	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten / Kota	Jumlah perangkat daerah yang terlayani keamanan informasi	22 Perangkat Daerah	
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi		Meningkatnya Pemanfaatan Jaring Komunikasi Sandi untuk Pengamanan Informasi Publik yang dikecualikan		
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kosong	jumlah laporan operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi antar provinsi dan kab/kota	1 Laporan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Penyusunan BMD	1 Laporan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten / Kota			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten / Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	30 Orang	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	124 Stel	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda			
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Samarinda	Jumlah Dokumen Laporan Tanggapan hasil pemeriksaan	2 Dokumen	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah laporan Daftar Gaji dan Tunjangan	14 Laporan	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen LS dan GU Yang diverifikasi	200 Dokumen	



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Rekonsiliasi Realisasi keuangan yang dilaksanakan	12 Laporan	
Administrasi Umum Perangkat Daaerah	Kabupaten/Kota			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah laporan Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2 Laporan	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	1 Laporan	
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Laporan	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah laporan Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Laporan	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah laporan Jasa Kebersihan Kantor	12 Laporan	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten / Kota	Jumlah laporan Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Laporan	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional	2 Unit	
Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Penyediaan Mebel	5 Unit	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	20 Unit	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jumlah dokumen jasa Surat menyurat dan benda pos	12 Bulan	



	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah laporan daftar gaji dan pengelola keuangan	13 Laporan	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	1 Dokumen	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	5 Dokumen	



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipandang sebagai suatu sistem yang tugas dan fungsinya dilakukan oleh beberapa subsistem yang masing-masing dilaksanakan oleh satu PD. Seluruh PD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saling berinteraksi dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Seringkali informasi keluaran dari suatu PD akan diolah lebih lanjut oleh PD lainnya untuk menghasilkan informasi yang strategis, sehingga dengan demikian, aliran informasi dari satu PD ke PD lainnya harus dapat dijamin terlaksananya serta kebenarannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan perangkat Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung tugas keseharian pemerintahan sudah menjadi suatu kebutuhan. Dalam mewujudkan pembangunan/ pengembangan TIK yang terintegrasi maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bermaksud untuk melakukan sinergi implementasi TIK dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang terkandung didalamnya dengan tujuan agar:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sistem pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.
- b. Menciptakan transparansi terhadap sistem pemerintahan kepada masyarakat serta mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan di Kaltim.
- c. Mengurangi kesenjangan informasi di segenap lapisan masyarakat Kalimantan Timur.

Selain aspek-aspek di atas, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini dan ke depan adalah:

1. Kebijakan dan perundang-undangan.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah pengaturan / regulasi di bidang komunikasi dan informatika masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi. Pengaturan di bidang penyiaran dilakukan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pengaturan di bidang telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Demikian halnya



pengaturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan pengaturan mengenai Informasi Publik dilakukan berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sedangkan pengaturan mengenai Pos dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 kemudian sejak tanggal 14 Oktober 2009 telah diberlakukan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

2. Masalah Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Beberapa permasalahan birokrasi saat ini di antaranya adalah belum terbangunnya budaya kerja yang kuat, belum berfungsinya pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan secara maksimal dan masih lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, sehingga secara keseluruhan kondisi tersebut mempengaruhi capaian kinerja yang kurang optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara menyeluruh, yang antara lain dapat ditempuh melalui reformasi birokrasi yang meliputi restrukturisasi kelembagaan, peningkatan kualitas SDM dan remunerasi.

3. Teknologi.

Sebagai sebuah *general purpose technology*, khususnya teknologi informasi dan komunikasi dapat dipergunakan dalam banyak bidang dan untuk memenuhi banyak macam kebutuhan. Walaupun begitu teknologi informasi sebenarnya memainkan peran fundamental yang sangat sederhana, yaitu:

- a. Menyediakan akses dan mengorganisasikan data, informasi dan pengetahuan dalam jumlah besar dengan kecepatan menakjubkan dan aman.
- b. Mempercepat dan mereduksi biaya transaksi dan produksi seluruh kegiatan perekonomian.
- c. Membentuk hubungan langsung antar manusia, komunitas, perusahaan, pemerintah, dan organisasi pada umumnya.

Mengingat pentingnya peranan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana tersebut di atas, maka infrastruktur komunikasi dan informatika sebagai infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan



bangsanya, mutlak harus dibangun dan disediakan oleh negara dengan melibatkan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya, karena di masa depan. informasi tidak lagi menjadi domain negara, tetapi juga merupakan domain publik yang dapat dibuat dan diakses oleh setiap anggota masyarakat. Keterlibatan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi disparitas ketersediaan infrastruktur antara perkotaan dan perdesaan, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia yang masih besar.

4. Informasi dan edukasi/*e-literacy*.

Belum optimalnya upaya pelayanan informasi publik untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat terhadap informasi publik mengakibatkan adanya kesenjangan kemampuan akses masyarakat terhadap informasi, sehingga menimbulkan permasalahan dalam hal keadilan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi masyarakat secara individual.

Adanya ketidakjelasan pembatasan informasi publik dan yang bukan informasi publik, menimbulkan permasalahan mengenai hak masyarakat atas informasi pemerintah dan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat serta perlindungan rahasia negara, yang antara lain juga disebabkan oleh belum disadarinya sekuritas informasi oleh institusi/lembaga penyedia informasi.

5. Pasar, Pelaku Usaha dan Masalah *Software* Ilegal/Bajakan. Perkembangan TIK terjadi sangat pesat dan cepat berubah sehingga membuat suatu perangkat teknologi informasi dan komunikasi menjadi cepat usang. Di Indonesia kemampuan untuk memproduksi perangkat TIK relatif sangat rendah sehingga mengakibatkan sifat ketergantungan dalam memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut memosisikan Indonesia sebagai Negara yang banyak mengimpor perangkat/produk industri di bidang TIK dimana ditinjau dari segi harga relatif menjadi lebih mahal. Kondisi sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kecenderungan terjadinya penggunaan perangkat TIK (*software*) bajakan yang cukup besar dan berdampak pada sistem industri dan perekonomian dalam negeri. Terjadinya pembajakan *software* yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut menunjukkan bahwa masih lemahnya fungsi pengawasan terhadap aktivitas pemasaran perangkat TIK produk bajakan.



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, diperlukannya kebijakan yang berorientasi pada objek sasaran yang akan di capai. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang menunjang kegiatan pemerintah daerah.
- b. Terwujudnya keterbukaan informasi dengan meningkatkan sistem, metode, dan mutu penyebarluasan serta pelayanan informasi kepada masyarakat.
- c. Tersedianya infrastruktur bidang Komunikasi dan Informasi dalam pemenuhan kebutuhan akses informasi kepada masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Agar tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur diperlukan adanya tindakan nyata berupa program dan kegiatan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Untuk tahun 2021 kegiatan yang diusulkan meliputi 5 program, 14 kegiatan dan 58 sub kegiatan yaitu:

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
 - 1.1. Pengelolaan Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
 - 1.1.1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
 - 1.1.2. Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik
 - 1.1.3. Monitoring Informasi Dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Komunikasi Pemerintah Daerah
 - 1.1.4. Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media
 - 1.1.5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - 1.1.6. Pelayanan Informasi Publik
 - 1.1.7. Layanan Hubungan Media
 - 1.1.8. Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
 - 1.1.9. Manajemen Komunikasi Krisis
 - 1.1.10. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunitas Publik
 - 1.1.11. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah
 - 1.1.12. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas



2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - 2.1. Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
 - 2.1.1. Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - 2.1.2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - 2.2. Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah
 - 2.2.1. Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - 2.2.2. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 2.2.3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - 2.2.4. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - 2.2.5. Koordinasi Dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
 - 2.2.6. Koordinasi Dan Sinkronisasi Data Dan Informasi Elektronik
 - 2.2.7. Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 2.2.8. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - 2.2.9. Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 3.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Provinsi
 - 3.1.1. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - 3.1.2. Peningkatan Kapasitas Sdm Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi
 - 3.1.3. Membangun Metadata Statistik Sektoral
 - 3.1.4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 - 3.1.5. Pengembangan Infrastruktur
 - 3.1.6. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Di Daerah
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - 4.1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi



- 4.1.1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
- 4.1.2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
- 4.1.3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik
- 4.1.4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
- 4.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi
 - 4.2.1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
- 5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - 5.1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 5.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 5.1.2. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
 - 5.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 5.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 5.2.1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn
 - 5.3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - 5.3.1. Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd
 - 5.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 5.5. Administrasi Umum Perangkat Daaerah
 - 5.5.1. Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 5.5.2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - 5.5.3. Penyedian Barang Cetakan Dan Pengadaan
 - 5.5.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd
 - 5.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.6.1. Pengadaan Mebel
 - 5.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- 5.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 5.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- 5.7.3. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- 5.7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - 5.8.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainny



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NAMA PERANGKAT DAERAH : DISKOMINFO

No					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
(1)					(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				APBD				
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			59.400.000.000	APBD				23,368,551,999.00
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				APBD				

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022



2	16	02	1.01		Pengelolaan dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi					APBD			5.452.155.674
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Desiminasi Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota		98.580.000	APBD			
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Perubahan Pertama Kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota	80 Peserta	10.422.000	APBD		85 Peserta	
2	16	02	1.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota	275 Peserta	113.820.000	APBD		280 Peserta	
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota	8 Media Center	250.000.000	APBD		9 Media Center	
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota	2 Laporan	2.301.220.000	APBD		2 Laporan	
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota	50 Perangkat Daerah	4.100.000.000	APBD		50 Perangkat Daerah	
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota	3 Laporan	469.298.000	APBD		3 Laporan	
2	16	02	1.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota	2 Laporan	350.000.000	APBD		2 Laporan	
2	16	02	1.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota	2 Laporan	6.660.000	APBD		2 Laporan	
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunitas Publik	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Komunikasi	Kabupaten/Kota	40 Orang	150.000.000	APBD		40 Orang	

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022



						Publik								
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Sengketa Informasi yang tertangani	Kabupaten/Kota	80 Sengketa	1.500.000.000	APBD			80 Sengketa	
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota	2 Laporan	200.000.000	APBD			2 Laporan	
2	16	02	1.01	13	Penyediaan/Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi					APBD				
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					APBD				3.952.701.863
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					APBD				
2	16	03	1.01	1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi					APBD				
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah yang di kelola	Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	425.000.000	APBD			34 Perangkat Daerah	
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah provinsi	Kabupaten/Kota	26 Perangkat Daerah	4.080.149.030	APBD			26 Perangkat Daerah	
2	16	03	1.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					APBD				
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tingkat Kematangan penerapan SPBE	kosong	15 Perangkat Daerah	452.790.000	APBD			15 Perangkat Daerah	
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah penerapan spbe perangkat daerah	Kabupaten/Kota	15 Perangkat Daerah	147.210.200	APBD			15 Perangkat Daerah	
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat	Kabupaten/Kota	20 Perangkat Daerah	2.277.015.000	APBD			20 Perangkat Daerah	

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022



						data daerah								
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam sistem komunikasi	Kabupaten/Kota	20 Perangkat Daerah	118.020.157	APBD			20 Perangkat Daerah	
2	16	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah laporan kordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	Kabupaten/Kota	1 Laporan	60.000.000	APBD			1 Laporan	
2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	Kabupaten/Kota	22 Perangkat Daerah	323.430.000	APBD			22 Perangkat Daerah	
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah dokumen arsitektur aplikasi perangkat daerah	Kabupaten/Kota	1 Dokumen	199.999.800	APBD			1 Dokumen	
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	jumlah layanan administrasi publik perangkat daerah yang terintegrasi	Kabupaten/Kota	22 Perangkat Daerah	128.753.750	APBD			22 Perangkat Daerah	
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas					APBD				
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Kabupaten/Kota		425.000.000	APBD				
2	16	03	1.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)					APBD				
2	16	03	1.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE					APBD				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					APBD				
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					APBD				748.590130
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur				APBD				
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur di Pemprov. Kaltim				APBD				

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022



2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Buku Data Statistik Sektoral yang terpublikasikan	Kabupaten / Kota	3 Buku	249.261.768	APBD		3 Buku	
2	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas SDM nya dalam rangka peningkatan mutu statistik sektoral yang terintegrasi	Kabupaten / Kota	6 Orang	104.700.000	APBD		6 Orang	
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Kelengkapan Metadata Statistik Sektoral di Perangkat Daerah	Kabupaten / Kota	2 Laporan	257.825.000	APBD		2 Laporan	
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Kebijakan tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kabupaten / Kota	2 Laporan	259.293.500	APBD		2 Laporan	
2	20	02	1.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Sistem Informasi Statistik Sektoral yang terintegrasi	Kabupaten / Kota	1 Sistem Informasi	428.919.732	APBD		1 Sistem Informasi	
2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Otorisasi Statistik Sektoral di Perangkat Daerah	Kabupaten / Kota		0	APBD			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					APBD			
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					APBD			
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					APBD			248.712.564
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)				APBD			
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Kabupaten / Kota	1 Dokumen	28.400.000	APBD		1 Dokumen	
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	jumlah laporan pengamanan informasi berbasis elektronik dan non elektronik	Kabupaten / Kota	30 Orang	114.346.000	APBD		30 Orang	

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022



2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah perangkat daerah yang terlayani keamanan informasi	Kabupaten / Kota	1 Laporan	411.407.400	APBD		1 Laporan	
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang terlayani keamanan informasi	Kabupaten / Kota	22 Perangkat Daerah	132.992.000	APBD		22 Perangkat Daerah	
2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Pemanfaatan Jaring Komunikasi Sandi untuk Pengamanan Informasi Publik yang dikecualikan				APBD			
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	jumlah laporan operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi antar provinsi dan kab/kota	Kosong	1 Laporan	83.796.199	APBD		1 Laporan	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI					APBD			
2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					APBD			12.966.391.768
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Kabupaten / Kota	5 Dokumen	81.803.361	APBD		5 Dokumen	
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kabupaten / Kota	1 Dokumen	209.720.000	APBD		1 Dokumen	
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten / Kota	5 Dokumen	224.360.000	APBD		5 Dokumen	
2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					APBD			
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Daftar Gaji dan Tunjangan	Samarinda	14 Laporan	11.466.049.009	APBD		14 Laporan	
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen LS dan GU Yang diverifikasi	Samarinda	200 Dokumen	0	APBD		200 Dokumen	
2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel	Samarinda	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
2	16	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Laporan Tanggapan hasil pemeriksaaan	Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0	APBD		2 Dokumen	
2	16	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Rekonsiliasi Realisasi keuangan yang dilaksanakan	Samarinda	12 Laporan	33.600.000	APBD		12 Laporan	

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022



2	16	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					APBD		
2	16	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan BMD	Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	APBD		1 Laporan
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					APBD		
2	16	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Samarinda	124 Stel	378.810.000	APBD		124 Stel
2	16	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	Kabupaten/Kota	30 Orang	63.500.000	APBD		30 Orang
2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daaerah					APBD		
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	2 Laporan	19.700.544	APBD		2 Laporan
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	Samarinda	1 Laporan	59.238.050	APBD		1 Laporan
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah laporan Barang Cetak dan Pengandaan	Samarinda	1 Laporan	49.969.800	APBD		1 Laporan
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten / Kota	12 Bulan	945.511.000	APBD		12 Bulan
2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					APBD		
2	16	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional	Samarinda	2 Unit	1.163.670.000	APBD		2 Unit
2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Penyediaan Mebel	Samarinda	5 Unit	17.500.000	APBD		5 Unit
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Samarinda	20 Unit	51.800.000	APBD		20 Unit
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					APBD		
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Samarinda		12.000.000	APBD		
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	12 Laporan	482.216.768	APBD		12 Laporan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2022



2	16	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	12 Laporan	47.880.000	APBD		12 Laporan	
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan daftar gaji dan pengelola keuangan	Samarinda	13 Laporan	3.247.236.832	APBD		13 Laporan	
2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Samarinda			APBD			
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan Pemeliharaan Gedung Kantor	Samarinda	12 Laporan	337.304.700	APBD		12 Laporan	
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan Pemeliharaan Gedung Kantor	Samarinda	1 Laporan	20.000.000.000	APBD		1 Laporan	
2	16	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laporan Jasa Kebersihan Kantor	Samarinda	12 Laporan	249.820.400	APBD		12 Laporan	



BAB.V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan berpedoman pada Renstra PD. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Kaltim memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan yang nantinya akan di usulkan ke BAPPEDA Provinsi Kaltim.

Dipandang dari sisi anggaran sampai dengan tahun 2022 jumlah anggaran Diskominfo relatif terbatas, apalagi bila dibandingkan dengan target untuk mengejar berbagai ketertinggalan terutama untuk mengimbangi percepatan perubahan dan perkembangan di bidang teknologi informasi yang meliputi perangkat hardware, software dan jaringan infrastruktur, peningkatan SDM TIK. Disamping itu kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait seperti TVRI, RRI, dan Komisi Informasi Provinsi anggarannya masih melekat di Diskominfo Prov. Kaltim sehingga Diskominfo membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Dengan peningkatan anggaran dari tahun 2021 ke tahun 2022 diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dapat mewujudkan Provinsi Kalimantan Timur berbasis Teknologi Informasi dan meningkatkan percepatan stabilitas dalam bidang komunikasi di daerah-daerah yang masih minim serta banyak kendala.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117

Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 060/111/Diskominfo
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, maka Perangkat Daerah menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan rencana Pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan jangka panjang daerah, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah;



Membangun Bersama Dengan Keterbukaan



Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim.

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 050/K.235/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, maka Perangkat Daerah menetapkan Rencana Kerja Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan merumuskan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 pada Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Juli 2022



H. MUHAMMAD FAISAL, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199402 1 001



LAMPIRAN	<p>KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 060/111/Diskominfo TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022</p> <p>BUSANNA PERSONAL PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022</p>
Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
Wakil Ketua	Sekretaris Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
Sekretaris	Kasubbag Perencanaan dan Program Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan Kebangsaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Personil Kalimantan Timur 2. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur 3. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Kesehatan dan Information Personal Kalimantan Timur 4. Kepala Bidang Statistik Data Kelembagaan dan Informasi Personal Kalimantan Timur 5. Kepala Bidang Identifikasi Citra dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur 6. Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur 7. Kepala Seksi Hubungan Media Masyarakat Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur 8. Kepala Seksi Infrastruktur Telekomunikasi dan Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur 9. Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Personalia Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur 10. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur 11. Kepala Seksi Pengelolaan E-Governance Dinas Kesehatan dan Information Personal Kalimantan Timur 12. Kepala Seksi Penguatan Domain dan Aplikasi Dinas Kesehatan dan Information Personal Kalimantan Timur 13. Kepala Seksi Pemerintahan SIAI Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur 14. Pih. Kepala Seksi Statistik Sosial Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur 15. Kepala Seksi Statistik Ekonomi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur 16. Kepala Bidang Statistik Sumber Daya Alam dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur 17. Kepala Seksi, Sistem Layanan Dinas Kesehatan dan Information Personal Kalimantan Timur 18. Kepala Sub-Bagian Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur 19. Riko Aji Prabowo, S.Sn (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur) 20. Ferry, S.Kom (Staf Dinas Kesehatan dan Information Personal Kalimantan Timur)



21. Irwansyah, ST (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
22. Rudi Syavitri, SE (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
23. Adi Setiawan, S.Kom (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
24. Sukmawaty, ST (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
25. M. Navita Sandi Al Gamar (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
26. Didit Widiawati (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
27. Yana Nasdiah (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
28. Dafied Ryan (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Juli 2022



H. MUHAMMAD FAISAL, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199402 1 001